IPM 2024 Jateng Kategori Tinggi

SEMARANG (KR) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Dadang Hardiwan mengatakan, BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 di Jawa Tengah masuk kategori tinggi. Pada 2023, IPM Jawa Tengah berada di angka 73,39 atau naik 0,81 persen dari 2022. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Jawa Tengah Dadang Hardiwan kepada wartawan di Semarang Jumat (1/12), melalui konferensi pers via daring. Menurutnya, IPM berbasis tiga dimensi yakni, umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun.

Berdasar data yang ada di BPS, umur harapan hidup anak yang dilahirkan pada 2023 sekitar 74,69 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah 8,01 tahun atau kelas 2 SMP, serta harapan lama sekolah adalah 12,85 tahun atau setara Diploma I. Dengan data tersebut, menunjukan kalua di Jawa Tengah tidak ada capaian IPM berkategori rendah. Dadang mengungkapkan, secara spasial tercatat empat wilayah mencapai IPM sangat tinggi, yakni Kota Magelang, Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta. Sebanyak 28 wilayah berkategori tinggi, dan tiga kabupaten berkategori sedang. Dari data yang ada di BPS tercatat IPM tertinggi di Jawa Tengah ada di Kota Salatiga dengan 84,99, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pemalang dengan 68,08. **(Bdi)-f**

Inspektorat Daerah Audit Kerugian Negara

KARANGANYAR (KR) - Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menghitung nilai kerugian negara di dua objek pemeriksaan. Pemeriksaan itu permintaan aparat penegak hukum (APH) di tahun 2022 dan 2023. Kepala Kantor Inspektorat Daerah, Zulfikar Hadid mengatakan satu objek telah selesai dilakukan perhitungan nilai kerugian negara, yakni perkara korupsi di tubuh BUMDes Berjo Kecamatan Ngargoyoso. Auditnya pada tahun 2022.

"Kami diminta Kejaksaan menghitung dan mengaudit dugaan korupsi di BUMDes Berjo pada 2022 lalu," katanya, Minggu (3/12). Di kasus itu, Kades Berjo non aktif Suyatno terbukti korupsi dana BUMDes periode 2020 dan dijatuhi vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp1,16 miliar. Selain dirinya, pengadilan juga memvonis eks Dirut BUMDes Berjo Eko Kamsono.

Zulfikar mengatakan surat pengadilan perihal putusan incraht Suyatno telah diterima Pemkab Karanganyar. Surat itu mendasari Dispermasdes memberhentikan Suyatno dari jabatan Kades Berjo dan memproses penunjukan Pj kades. Lebih lanjut dikatakan, Inspektorat juga mengaudit kerugian negara pada program bantuan bibit bersumber APBD Kabupaten Karanganyar yang diterima kelompok tani di Karanganyar pada 2023.

"Tahun ini Polres meminta bantuan kami mengaudit investigasinya. Terkait bantuan bibit di salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar," katanya. Ia menolak menyebut identitas kelompok tani yang sedang diinvestigasi aparat penegak hukum (APH). Namun dalam perhitungan kerugian, nilainya tak terlalu signifikan. Sehingga kemungkinan prosesnya hanya pembinaan dan pengembalian kerugian negara.

Ia juga mengetahui kejaksaan sedang menginvestigasi kasus dugaan penjualan bantuan alsintan aspirasi DPR di Karanganyar. Namun audit kerugian negara bukan pihaknya yang menghitung. Zulfikar mengatakan pada tahun ini Inspektorat menyelesaikan laporan pengawasan daerah periode tahun 2022 dan semester I tahun 2023. Hasilnya telah dipaparkan ke bupati pada November lalu. "Fungsi utama pengawasannya pada early warning. Penjatuhan sanksi administratif dan penjatuhan tata kelola. Memastikan pengendalian intern dijalankan," katanya. Teguran dan pengembalian dana atas pelanggaran administrasi maupun keuangan diberi batas waktu 60 hari penyelesaian. **(Lim)-f**

Pemkab Klaten Gelar Selamatan Pasar Gedhe

KLATEN (KR) - Pemkab Klaten menggelar acara Selamatan Pasar Gedhe Klaten, bertempat di Alun-alun Klaten, Sabtu malam (2/12). Kepala DKUKMP Kabupaten Klaten Anang Widjatmoko mengatakan, Pasar Gedhe Klaten telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR dan menelan dana Rp 88,8 Milyar. Pasar Gedhe Klaten disebut-sebut menjadi pasar pertama di Indonesia yang menggunakan PLTS dan ramah lingkungan. Selain itu, Pasar Gedhe juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti eskalator dan travelator. Meski demikian, Anang menegaskan bahwa harga yang dipatok oleh pedagang sama dengan yang lain. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk berbelanja di Pasar Gedhe.

"Malam ini luar biasa, penuh oleh masyarakat Klaten yang hadir dalam Selamatan. Ini merupakan wujud syukur Pemkab Klaten atas selesainya revitalisasi Pasar Gedhe Klaten yang nantinya akan segera diresmikan. Pasar Gedhe ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti eskalator, travelator bahkan ada PLTS sehingga ramah lingkungan. Masyarakat tidak perlu khawatir, harganya sama dengan yang lain, tidak mahal. Ayo kita berbelanja di Pasar Gedhe Klaten. Pasar e resik, rejekin e apik. Bangkit pedagang e, bangkit ekonomin e," kata Anang.

Bupati Klaten Sri Mulyani menuturkan, kegiatan selamatan Pasar Gedhe Klaten merupakan bentuk wujud syukur Pemkab Klaten karena Pasar Gedhe Klaten telah selesai dibangun. Selain itu, kegiatan itu juga merupakan ajang untuk sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Klaten agar mau berbelanja di pasar. Ia berharap pasar yang akan segera diresmikan tersebut dapat ramai pengunjung, sehingga roda perekomonian Klaten terus berputar. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Klaten yang telah hadir disini. Ini adalah wujud syukur kami, Pemkab Klaten, karena Pasar Gedhe Klaten sudah selesai dibangun, kata Bupati. **(Sit)-f**

KR-Sri Warsiti

Muspida bergembira bersama masyarakat.

PERINGATI HKN KE-59 TAHUN 2023

Dilaunching UHC Kabupaten Magelang

MAGELANG (KR) - Dalam rangkaian memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 Tahun 2023 di Kabupaten Magelang, beberapa kegiatan dilaksanakan, di antaranya launching program Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Magelang dan meresmian Gedung Rawat Jalan RSUD Muntilan, Sabtu (2/12). Kegiatan dilaksanakan di halaman parkir RSUD Muntilan.

Dalam kesempatan ini Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP menerima piagam penghargaan dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang drg Irfan Qadarusman CHRPe. Didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Magelang Christanti Handayani, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Drs Adi Waryanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dr Sunaryo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang maupun lainnya juga melakukan pemukulan gong serta menandatangani prasasti peresmian.

Bupati Magelang mengatakan akhirnya dapat memenuhi ketentuan undang-undang, bahwa Kabupaten Magelang sudah mampu mencapai sekitar 98,09 persen, laporan sebelumnya 98 persen. Menurut Bupati Magelang. ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri lantaran dapat memenuhi tanggung jawab Undang-Undang Dasar, yaitu bagaimana melindungi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Dengan UHC ini semua dapat terlayani dengan baik, khususnya di bidang kesehatan. "Artinya pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik," kata Bupati Magelang. Juga dikatakan, tantangan mendatang tidak lebih mudah, tetapi semakin tinggi. Di tengah-tengah keinginan menuju Indonesia Emas Tahun 2045, diharapkan bersama bahwa di era itu anak-anak Generasi Milenial maupun Generasi Z akan memegang tampuk pimpinan mendatang dengan menuju Indonesia Emas tersebut.

Untuk menuju Indonesia Emas itu, tentu memiliki prasyarat. Salah satunya adalah kesehatan. Tanpa kesehatan yang baik di tengah-tengah masyarakat, mustahil akan menghasilkan SDM yang unggul. "Tidak mungkin kita mendapatkan generasi-generasi yang unggul untuk menuju Indonesia Emas itu," katanya. Maka ini merupakan bagian dari proses perjalanan rintisan untuk mencapai Indonesia Emas. Artinya, dimensi kesehatan memiliki peran yang strategis, peran yang penting, peran yang utama di dalam membangun Indonesia mendatang, khususnya menuju Indonesia Emas 2045 nanti.

"Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi," tambahnya. Bonus ini akan dicapai pada titik tertinggi tahun 2030-an. Kalau di tahun 2030-an kondisi kesehatan generasi-generasi muda di bonus demografi ini tidak baik-baik, akan menjadi masalah. Karena itu Bupati Magelang berharap kepada seluruh dinas tentang kegotongroyongan, kebersamaan agar terus ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang untuk menyongsong menuju Indonesia Emas ini.

Bupati Magelang juga berharap jangan berhenti, bagaimana harus menghadirkan generasi-generasi yang cukup baik, karena dengan kebersamaan, kegotongroyongan, akan mampu menciptakan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang diantaranya mengatakan Kabupaten Magelang telah memenuhi syarat menerapkan program UHC karena sudah lebih dari 98 persen penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif dan non aktif, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Magelang dapat terjamin pembiayaan kesehatannya. **(Tha)-f**

KR-Thoha

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang saat menyerahkan piagam penghargaan yang diterima Bupati Magelang.

KPU Salatiga Butuh 4.564 Anggota KPPS

SALATIGA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga segera merekrut 4.564 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Langkah ini sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan untuk Pemilu 2024, 14 Februari 2024.

Ketua KPU Salatiga, Yesaya Tiluata kepada wartawan menjelaskan jumlah 4.564 anggota KPPS tersebut akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Salatiga yang jumlahnya 652 tempat.

"Kami KPU Salatiga bakal rekrutmen anggota KPPS untuk 652 TPS yang jumlahnya 4.564 orang. Tiap TPS sebanyak 7 orang, " kata Yesaya Tiluata kepada *KR*, Sabtu (2/12). Sedangkan jumlah pemilih tetap (DPT) di KPU Salatiga, menurut Yesaya 146.267 orang, DPT tambahan yang masuk ke Salatiga (memilih di Salatiga) sampai Sabtu (2/12) sebanyak 413 orang, yang keluar dari Salatiga memilih di daerah lain 198 orang.

Komisi KPU Salatiga Divisi Perencana Data dan Informasi, Jalal Pambudi mengatakan rekruitmen anggota KPPS dilakukan pada 11 Desember 2023 dan diharapkan calon KPPS memiliki keahlian teknologi terutama penggunaan android. "Kami berharap KPPS yang bertugas nanti tidak gagap teknologi (gaptek), " kata Jalal Pambudi.

Apakah calon KPPS dalam mengikuti wajib memilik android, hal ini diegaskan oleh Komisi KPU Salatiga, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wahyu Budi Utomo. Ia menyatakan bahwa kepemilikan android bagi pelamar anggota KPPS akan menjadi pertimbangan tetapi tidak mutlak.

"Akan menjadi pertimbangan kami saat seleksi KPPS, " kata Wahyu. Saat ini KPU Salatiga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat. "Waktunya semakin dekat, kurang lebih 73 hari lagi, " katanya, Sabtu (2/12). **(Sus)-f**

Piala Dunia U-17 Berlangsung Lancar

SOLO (KR)- Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 yang dihelat di Stadion Manahan Surakarta dinilai berjalan dengan lancar. Kesuksesan itu tidak lepas dari dukungan masyarakat. Untuk itu Gubernur memberikan apresiasi kepada masyarakat Solo Raya yang telah turun mensukseskan jalannya kompetisi piala dunia sepakbola U-17.

KR-Budiono

Nana Sudjana

Pj Gubernur Nana Sudjana mengatakan hal ini kepada wartawan usai menyaksikan partai final antara tim Jerman melawan tim Prancis di Stadion Manahan Sabtu (2/12). Dari awal kompetisi hingga pertandingan pamungkas yang mempertemukan dua tim dari Eropa tersebut terselenggara dengan baik. Selain Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, partai fina sepakbola U 17 juga disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo.

Nana Sudjana menilai, kompetisi sepak bola berskala internasional yang berlangsung 10 November hingga 2 Desember 2023 berjalan dengan lancar dan tertib. Kota Surakarta menjadi tuan rumah mulai dari penyisihan, per delapan final, perempat final, semi final, final, hingga upacara penutupan.

Keberhasilan ini menurut Nana, menjadi indikator bahwa Indonesia mampu melaksanakan kompetisi berkelas dunia. "Selama pelaksanaan kita selalu bersyukur, karena sajak awal sampai akhir pertandingan, berjalan dengan tertib dan tidak ada suatu permasalahan yang menonjol," kata Nana.

Indonesia sebagai panitia perhelatan sepakbola internasional mampu menyelenggerakan dengan baik. Keberhasilan itu tidak lepas dari peran masyarakat Solo Raya pada khususnya, dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Masyarakat mampu menjaga situasi yang nyaman dan kondusif. "Saya berterima kasih dan mengapresiasi, khususnya bagi panitia dan masyarakat Solo Raya yang telah melaksanakan kepanitiaan. **(Bdi)-f**

Defisit APBD 2024 Temanggung Rp 137,5 M

TEMANGGUNG (KR) - DPRD dan Bupati Temanggung menyetujui anggaran APBD 2024 defisit Rp 137,5 miliar dengan pendapatan Daerah Rp 1,96 triliun dan belanja sebesar Rp 2,01 triliun.

"Melalui sidang paripurna DPRD menetapkan APBD 2024, selanjutnya akan dimintakan evaluasi kepada Gubernur Jateng," kata Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto, Sabtu (2/12).

Yunianto mengatakan sesuai target, sidang paripurna persetujuan RAPBD menjadi APBD digelar sebelum penghujung tahun. Setelah mendapat persetujuan, eksekutif akan mengirim ke Provinsi untuk evaluasi dari Gubernur, sebelum kemudian dijalankan.

Sedangkan Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo mengatakan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 merupakan proses pembahasan yang sangat berat, bagi Kabupaten Temanggung.

Kondisi keuangan daerah saat ini terdapat beban belanja yang cukup besar yang salah satunya untuk pemilihan bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024. Yunianto mengemukakan ada surat Menteri Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomer S-28/pk/2023 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun 2024, meskipun terdapat kenaikan namun sudah ada pos-pos yang sudah ditentukan penggunaannya sehingga masih terdapat defisit yang cukup besar. **(Osy)-f**

Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang Belum Terkelola Maksimal

SEMARANG (KR) - Aset tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang seluas 22 hektare, di belakang Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), belum terberdayakan maksimal. Pascadikuasai kembali dari Bos PT Tensindo, Sutjipto, sejak tahun 2000, hingga kini aset tersebut masih banyak yang belum terkelola, meski secara hukum sudah tidak ada masalah.

"Seyogianya, aset tersebut harus terkelola masimal untuk memberi kemaslahatan umat dan kemakmuran bagi masjid-masjid di Semarang, terutama Masjid Agung Semarang (MAS) dan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), yang hingga kini masih membutuhkan perhatian," tegas Drs H Istajib AS, pelaku sejarah atas usaha pengembalian tanah wakaf Banda masjid MAS yang selama puluhan tahun sempat dikuasai bos PT Tensindo Soetjipto.

Paparan tersebut disampaikan dalam FGD bertema Urgensi Optimalisasi Aset Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Sabtu (3/12). FGD sambil selonjoran, santai tapi serius, diprakarsai MUI Jateng dihadiri pimpinan PPFF, Dr KH Fadholan Musyafa Lc MA sebagai tuan rumah yang sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng. Kemudian Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jateng Drs KH Eman Sulaeman MH.

Sekretaris MUI Jateng Dr KH Multazam Achmad MA, Drs KH Istajib AS, Prof Dr Nur Khoirin MAg, Ketua Komisi Infokom H Isdiyanto SIP, Setyawan Hendra Kelana, Dr KH Iman Fadhilah, Dr KH Umar Ma'ruf, dan sejumlah awak media massa diantaranya M Saronji dan Hamim Rifai.

Menurut Istajib, patut disayangkan bila hingga kini masih ada area tanah Wakaf Banda MAS yang belum terkelola. Dari 22 hektar di antaranya dibangun Rumah Sakit MAJT- MAS yang masih proses finishing, pembangunan 15 los pasar buah dan sayur, pasar Agro Wisata, serta kawasan pertokoan di Jalan Jalatunda. Istajib yang juga pengurus MAJT mengusulkan agar sisa tanah wakaf tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren Tahfidz Al-Qur'an dan lembaga pendidikan terkait lainnya.

Sebenarnya yang cukup mendesak, tambahnya, Yayasan Nadhir perlu menyiapkan Ponpes Tahfidz yang representatif sebagai kelanjutan Ponpes Tahfidz yang kini masih ndompleng di salah satu ruangan MAJT.

Dia berharap seluruh potensi SDM dan ketokohan keluarga besar MAJT, MAS dan MUI ikut memperhatikan.

Pengurus Komisi Fatwa, KH Taufiqur Rahman MSi, mengusulkan, dalam konteks pengaktifan kembali peran dan fungsi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) saat ini, bagaimana bila sekaligus memberdayakan BKM untuk mendayagunakan tanah banda masjid.

Wartawan pelaku sejarah, Muhammad Saronji mengurai, sebelum kasus Tanah Banda MAS menjadi besar dan kini terselesaikan secara tuntas, tokoh utama yang menyuarakan pertama kali, Kiai Istajib AS, disusul KH Thoyfoer MC dan Prof. KH. Noor Achmad MA, baru lainnya.

Saya pelaku/saksi sebagai wartawan lapangan Suara Merdeka bersama Isdiyanto (Kedaulatan Rakyat) dan Sunarto (Wawasan), aktif mengekspose mulai awal kasus itu sampai selesai lebih kurang enam tahun. Kemudian Gus Khammad Maksum, Al-Hafidz, sebagai pelaku lapangan sekaligus koordinator demo remaja masjid. **(Isi)-f**